1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Indeks Perkembangan Harga (IPH) Komoditas Utama

BULAN	MINGGU KE-	INDIKATOR PERUBAHAN HARGA (%)	KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA	MENGALAMI KENAIKAN/ PENURUNAN 2 MINGGU BERTURUT-TURUT
JULI	M1	-3.06	Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras	Cabai Merah
	M2	-3.10	Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras	Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras
	M3		Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras	
	M4	-3.10	Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras	Cabai Rawit, Cabai Merah, Telur Ayam Ras
AGUSTUS	M2	-0.38	Bawang Merah, Cabai Rawit, Cabai Merah	Bawang Merah, Cabai Rawit, Cabai Merah
SEPTEMBER	M1	1.00	Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, Telur Ayam Ras	Cabai Rawit

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Pada Triwulan III Tahun 2026, TPID Kabupaten Bangkalan terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan pasokan pangan melalui berbagai sumber data, termasuk informasi harga pasar dan Indeks Perubahan Harga (IPH).

   Secara umum, kondisi harga pangan perlu terus diwaspadai karena beberapa komoditas mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama pada September 2026 adalah **cabai rawit**.

   Berdasarkan bahan rapat penanganan cabai tanggal 23 September 2026, Kabupaten Bangkalan tercatat mengalami kenaikan IPH cabai rawit sebesar **27,01 persen sampai dengan Minggu III September 2026 dibandingkan Agustus 2026**. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada aspek ketersediaan pasokan, produksi, distribusi, dan stabilisasi harga cabai.

   Permasalahan utama pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 meliputi :

   1. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, khususnya aneka cabai;
   2. Ketersediaan pasokan hortikultura yang dipengaruhi oleh faktor musim dan kondisi produksi;
   3. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas;
   4. Potensi terjadinya disparitas harga antarwilayah;
   5. Perlunya peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal; dan
   6. Perlunya respons yang cepat terhadap kenaikan harga berdasarkan hasil pemantauan IPH dan informasi pasar.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Bangkalan pada Triwulan III tahun 2026 ini, TPID Kabupaten Bangkalan terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K, yaitu :

a) Keterjangkauan harga : Untuk menjaga kestabilan harga bapokting Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis :

- Melakukan pemantauan harga dan Stok Bahan pokok di 3 Pasar Pantauan yaitu Ki Lemah Duwur, Pasar Baru Bancaran dan Pasar Senenan untuk mendata Harga yang mengalami kenaikan atau penurunan harga pada bahan pokok harian setiap hari kerja dan diintegrasikan kedalam sistem SP2KP dan Siskaperbapo
- Melaksanakan monitoring/pemantauan harga komoditas pangan strategis di pasar rakyat menjelang Maulid Nabi SAW
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar
- Penyaluran Bantuan Pangan
- Penyaluran Beras SPHP

b) Ketersediaan Pasokan :

- Urban Farming “Taman Laku” (Tanam Mandiri Belanja Berkurang) oleh ibu-ibu PKK RW 09 Perum Pondok Halim 2 Kec. Burneh Kab. Bangkalan di lahan pekarangan
- Gerakan Menanam “Kampung Aku Hatinya” ibu-ibu PKK di Kelurahan Kemayoran
- Pemantauan produksi dan stok komoditas pangan strategis
- Identifikasi wilayah sentra produksi dan potensi pasokan
- Penguatan produksi cabai dan komoditas hortikultura
- Optimalisasi lahan pertanian dan pekarangan
- Penguatan koordinasi dengan kelompoktani dan pelaku usaha

c) Kelancaran Distribusi :

- Perbaikan dan pemeliharaan jalan ke lokasi penghasil hortikultura.
- Pemantauan kelancaran arus distribusi komoditas pangan
- Pemantauan potensi hambatan distribusi

d) Komunikasi Efektif :

- Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya, dilanjutkan dengan rapat teknis TPID yang dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Mengunggah informasi harga harian SP2KP melalui media sosial (instagram) Dinas Koperasi UM dan Perdagangan
- Memberikan media komunikasi yang informatif untuk mempermudah dan mempercepat aktifitas pelayanan peternakan melalui perangkat SmartKoe

3.

Pelaksanaan siaran interaktif (dialog interaktif, talk show) dan website mengenai informasi inflasi (pemantauan harga secara real time) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Radio SBFm Bangkalan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengendalian harga membutuhkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.

Beberapa hal yang menjadi perhatian evaluasi adalah :

1. Pemantauan komoditas strategis perlu lebih responsif

Perubahan harga komoditas tertentu dapat terjadi dalam waktu relatif cepat. Oleh karena itu, pemantauan harga perlu dilakukan secara rutin dan hasilnya segera diterjemahkan menjadi rekomendasi intervensi.

2. Cabai menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus

Kenaikan IPH cabai rawit Kabupaten Bangkalan sebesar 27,01 persen sampai dengan Minggu III September 2026 dibandingkan Agustus 2026 menunjukkan perlunya langkah pengendalian dari sisi hulu hingga hilir.

3. Produksi lokal perlu diperkuat

Penguatan produksi cabai dan hortikultura perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika terjadi kenaikan harga. Hal tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

4. KAD perlu dikembangkan secara lebih konkret

KAD tidak hanya diarahkan pada kerja sama administratif, tetapi perlu diarahkan pada mekanisme pasokan yang konkret antara daerah surplus dan Kabupaten Bangkalan, baik melalui pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

5. GPM perlu diarahkan berdasarkan kondisi harga

Pelaksanaan GPM perlu menggunakan hasil pemantauan harga dan IPH sebagai dasar penentuan komoditas, volume, lokasi, dan waktu pelaksanaan sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi Triwulan III Tahun 2026, beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1. **Memperkuat monitoring harga dan pasokan** komoditas pangan strategis secara rutin, terutama cabai, beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng.
    -

Melakukan intervensi lebih cepat terhadap komoditas yang menunjukkan kenaikan IPH secara signifikan.

3. **Memperkuat produksi cabai lokal**, termasuk memastikan pemanfaatan dukungan bantuan kawasan cabai secara optimal.
4. **Mendorong pengembangan KAD** dengan daerah penghasil cabai dan komoditas pangan strategis lainnya.
5. **Meningkatkan frekuensi dan ketepatan sasaran GPM** pada lokasi yang mengalami tekanan harga dan memiliki daya beli masyarakat yang membutuhkan dukungan.
6. **Memperkuat koordinasi dengan Bulog, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan instansi terkait** dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.
7. **Meningkatkan kualitas data pengendalian inflasi**, melalui sinkronisasi data IPH, SP2KP, Siskaperbapo dan informasi lapangan.
8. **Mengembangkan sistem peringatan dini gejolak harga** agar TPID dapat melakukan tindakan sebelum kenaikan harga semakin tinggi.
9. **Memperkuat komunikasi publik** mengenai perkembangan harga, ketersediaan pangan dan kegiatan intervensi pemerintah.
10. **Menyiapkan langkah antisipasi Triwulan IV**, khususnya terhadap peningkatan permintaan pangan menjelang periode Natal dan Tahun Baru serta potensi perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan.

2.